

Pengaruh Upah Minimum, Angkatan Kerja dan Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur

Nurul Adilah ^{a,1,*}, Teguh Hadi Priyono ^{b,2}, Edy Santoso ^{c,3}, Duwi Yunitasari ^{d,4}, Anifatul Hanim ^{e,5}, Agus Mahardiyanto ^{f,6}, Rachmania Nurul Fitri Amijaya ^{g,7}

^{a,b,c,d,e} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

¹ nuruladilah275@gmail.com *; ² teguh_hadipriyo@yahoo.com; ³ edysantoso@unej.ac.id; ⁴ duwiyunita.feb@unej.ac.id;

⁵ hanim.feb@unej.ac.id; ⁶ agusmahardiyanto.feb@unej.ac.id; ⁷ rachmania.feb@unej.ac.id

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received 8 May 2025

Revised May 2025

Accepted May 2025

ABSTRACT

Income inequality is an issue related to income differences between developing and underdeveloped communities or regions. The greater the difference in income, the greater the variation in income distribution which will cause disparities. in 2023, East Java will rise to fifth position nationally and 4th position with the highest level of inequality. This research aims to determine the effect of minimum wages, labor force, and investment on inequality in East Java Regency/City. The method used in this research is panel data analysis with secondary data. The results of this research show that the minimum wage, labor force, and investment have a positive and significant impact on income inequality in East Java.

Keywords

Income Inequality, Minimum Wage, Labor Force, Investment

1. Pendahuluan

Ketimpangan pendapatan adalah isu terkait perbedaan pendapatan antara masyarakat atau daerah yang berkembang dan yang tertinggal. Semakin besar perbedaan pendapatan, semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan yang akan menyebabkan disparitas. Pola distribusi pendapatan masyarakat yang diukur dengan indeks gini hanya dapat menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan secara umum, tetapi tidak menjelaskan seberapa besar bagian yang diterima oleh kelompok berpendapatan rendah atau miskin dari total pendapatan suatu wilayah (Badan Pusat Statistik, 2023). Terdapat beberapa teori yang membahas ketimpangan pendapatan antara lain yaitu Douglas C. North dalam analisisnya mengenai teori pertumbuhan neo-klasik yang kemudian dikenal dengan hipotesa neo-klasik. Dalam teorinya, Douglas C. North mengemukakan bahwa pada awal proses pembangunan sebuah Negara, ketimpangan antara wilayah akan mengalami peningkatan.

Ketimpangan merupakan fenomena di suatu daerah, salah satunya adalah di Jawa Timur. Jawa Timur berada di lokasi strategis yang menghubungkan wilayah barat dan wilayah timur. Lokasi ini menjadikan Jawa Timur memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi nasional, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1. 1 Ketimpangan Pendapatan Pada Lima Provinsi di Jawa

No	Provinsi	Index Gini Ratio
1	DI Yogyakarta	0.439
2	DKI Jakarta	0.423
3	Jawa Barat	0.417
4	Jawa Tengah	0.374
5	Jawa Timur	0.371

Sumber: BPS Jawa Timur, 2022 (Diolah)

Pada tahun 2018, Indeks Gini Ratio di Jawa Timur tergolong "tinggi", dimana Jawa Timur berada di peringkat ke-10 secara nasional dan peringkat kelima di Pulau Jawa dengan tingkat ketimpangan tertinggi mencapai 0,371. Sementara itu, pada tahun 2023, Jawa Timur naik ke posisi kelima secara nasional dan posisi ke-4 dengan tingkat ketimpangan tertinggi sebesar 0,387.

Ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk upah minimum kabupaten/kota, angkatan kerja, dan investasi. Upah minimum mempengaruhi ketimpangan pendapatan karena jika ada perbedaan upah minimum di suatu wilayah yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, maka hal itu akan menyebabkan masalah ketimpangan pendapatan. Hal ini sejalan dengan teori upah neo klasik yang menyatakan bahwa tujuan utama penetapan upah adalah untuk memenuhi standar hidup minimum seperti kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Angkatan kerja juga berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, yang dapat dilihat dari biaya yang dikeluarkan untuk mempekerjakan penduduk yang berusia di atas lima belas (15) tahun. Untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dalam konteks angkatan kerja, pendidikan yang lebih tinggi berkaitan dengan status pekerjaan yang lebih baik, yang dapat berdampak pada tingkat upah (Nadya, 2019). Data dari Sakernas tahun 2013 di Indonesia menunjukkan bukti yang kuat bahwa pendidikan berpengaruh lebih besar terhadap pendapatan bagi tenaga kerja yang lebih terampil (misalnya, tenaga kerja dengan pendidikan tinggi). Investasi juga berkontribusi terhadap ketimpangan pendapatan, terlihat dari fakta bahwa daerah dengan tingkat investasi tinggi cenderung mengalami perkembangan lebih baik dibandingkan daerah dengan investasi rendah. Teori Harrod-Domar menjelaskan bahwa investasi memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi dengan cara menciptakan pendapatan dan meningkatkan kapasitas produksi. Selain itu, investasi juga mendukung peningkatan aktivitas ekonomi,

menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan taraf kesejahteraan masyarakat (Luh & Yuni, 2015).

2. Tinjauan Pustaka

Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik

Teori pertumbuhan neo klasik memiliki perspektif yang berbeda dibandingkan dengan teori pertumbuhan lainnya, di mana teori ini melihat dari aspek penawaran. Teori ini menjelaskan bagaimana ekonomi tumbuh, tetapi juga menunjukkan meskipun ada potensi untuk konvergensi atau penurunan ketimpangan pendapatan, ketimpangan pendapatan bisa tetap ada atau meningkat jika distribusi sumber daya, teknologi dan modal tidak merata. Abrahamovits dan Solow, sebagai pencetus teori ini, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada kemajuan faktor-faktor produksi. Sumber pertumbuhan ekonomi berasal dari satu atau lebih dari tiga faktor, yakni peningkatan teknologi, peningkatan kualitas dan jumlah tenaga kerja, serta penambahan modal (Todaro, 2000).

Teori David Ricardo

Teori David Ricardo berpendapat bahwa perilaku, tindakan, dan perbuatan dari pekerja menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan upah, sementara penentuan upah sebaiknya dipengaruhi oleh persaingan upah di pasar. Selain itu, teori ini menguraikan upah berdasarkan hakikatnya, artinya upah tersebut harus cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya. Di dalam pasar, ada upah yang ditentukan oleh harga pasar, yaitu upah yang terbentuk dan berlaku di pasar yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Upah di pasar dapat berubah sesuai dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, para ahli ekonomi modern menjadikan upah alami sebagai batas minimum untuk upah kerja.

Teori Human Capital

Teori *human capital* berargumen bahwa pendidikan formal, keterampilan dan pengalaman kerja merupakan salah satu sarana utama untuk membangun masyarakat dengan produktivitas tinggi, yang selanjutnya mempengaruhi tenaga kerja (Schultz, 1961). Semakin tinggi pendidikan di dalam suatu masyarakat, semakin besar pula produktivitasnya. Data dari Sakernas 2013 di Indonesia memperlihatkan bahwa angkatan kerja dengan keterampilan lebih tinggi, yaitu mereka yang mendapatkan pendidikan lebih, berkontribusi lebih besar terhadap pendapatan. Oleh karena itu, pendidikan dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan. Ketidaksetaraan pendapatan timbul akibat fenomena *over-education*, pengaruh antara keterampilan dan pendidikan, serta perbedaan dalam kualitas sekolah di berbagai wilayah. Jumlah angkatan kerja dianggap sebagai salah satu parameter penting untuk menentukan tingkat pendapatan (Kuncoro, 2000). Dengan demikian, pendidikan berfungsi sebagai faktor kunci dalam menentukan tingkat upah yang memiliki dampak penting terhadap distribusi pendapatan (Nadya dan Syafri, 2019).

Teori Harrod dan Domar

Teori Harrod dan Domar menyoroti signifikansi peran investasi dalam pertumbuhan ekonomi, terutama dalam dua aspek penting dari investasi. Pertama, investasi berfungsi untuk menghasilkan pendapatan, dan kedua, investasi juga membantu meningkatkan kapasitas produksi ekonomi dengan cara

menambah stok modal (Jhingan, 2014). Investasi memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, namun investasi yang tidak merata dapat memperburuk ketimpangan pendapatan. Investasi yang terjadi di sektor-sektor tertentu akan menguntungkan masyarakat di wilayah tertentu. Teori investasi Harrod dan Domar menekankan pentingnya investasi dalam pertumbuhan ekonomi, karena investasi ini menghasilkan pendapatan dan meningkatkan kapasitas produksi dalam ekonomi melalui peningkatan modal yang diterapkan (Jhingan, 2014). Investasi bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan dorongan pada kemajuan teknologi dan pengembangan sosial ekonomi (Soleh, 2019). Berdasarkan (Musyrifah et al., 2024), rendahnya investasi di suatu daerah berdampak pada rendahnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita di wilayah tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kegiatan ekonomi produktif serta terkonsentrasinya investasi di daerah tertentu. Ketidakmerataan dalam distribusi investasi ini dianggap sebagai salah satu penyebab utama terjadinya ketimpangan dalam pembangunan.

Ketimpangan Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi yang pesat perlu diimbangi dengan distribusi pendapatan yang merata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Olliffiana & Khoirudin, 2022). Ketimpangan pendapatan merupakan perbedaan dalam pemenuhan kebutuhan yang tercapai dengan baik antara orang kaya dan miskin. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan dalam pendistribusian pendapatan yang diterima (Chusainy et al., 2023). Kuznet(1955) dalam penelitiannya mencari hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan di berbagai negara maju. Dengan hasil yang diperoleh bahwa ada pola hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan. Kuznet(1955) dalam penelitiannya mencari hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan di berbagai negara maju. Dengan hasil yang diperoleh bahwa ada pola hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan. (Suparman et al; 2021) mengungkapkan bahwa elastisitas ketimpangan selalu positif, yang menunjukkan bahwa pengurangan ketimpangan akan menurunkan tingkat kemiskinan jika upah minimum meningkat. Afandi et al. (2017) menjelaskan bahwa ketidakmerataan dalam distribusi dapat berakibat buruk bagi masyarakat, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan peningkatan upah minimum.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, metode yang digunakan adalah regresi data panel. Unit analisis dalam penelitian ini adalah jumlah ketimpangan pendapatan menggunakan variabel indeks gini ratio, sedangkan variabel independennya meliputi upah minimum, tenaga kerja, dan investasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sedangkan sumber data diperoleh dari publikasi resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Terdapat model estimasi yang akan digunakan untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum, angkatan kerja dan investasi terhadap ketimpanganpendapatan dari 38 kab/kota di Jawa Timur pada tahun 2014 hingga 2023. Maka dapat diketahui bahwa persamaan data panel pada penelitian ini adalah:

$$GR_{it} = \beta_0 + \beta_1UMK_{it} + \beta_2TPAK_{it} + \beta_3PMTB_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

GR: Ketimpangan pendapatan

β_0 : intersep

UMK : Upah Minimum Kabupaten/Kota

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien Regresi

TPAK :Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

t: Tahun

PMTB : Pembentukan Modal Tetap Bruto

i: Wilayah

ε_{it} : Error Term

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil uji lagrange multiplier yang telah dilakukan menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.0000. Nilai ini lebih kecil dari nilai 0.05 ($0.0000 < 0.05$). Maka dapat disimpulkan model terbaik dalam penelitian ini menggunakan *Random Effect Model (REM)*.

Tabel 4. 1 Hasil Uji Regresi Data Panel Random Effect Model (REM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.259008	0.038343	6.755119	0.0000
X1	4.71E-08	2.54E-08	8.157373	0.0000
X2	0.000757	0.000586	4.292381	0.0005
X3	6.65E-08	4.29E-08	5.148539	0.0000

Hasil estimasi regresi data panel dengan *Random Effect Model* dijelaskan dalam persamaan regresi sebagai berikut:

$$GR_{it} = 0.259008 + 4.71E-08UMK_{it} + 0.000757TPAK_{it} + 6.65E-08PMTB_{it} + \varepsilon_{it}$$

Berdasarkan persamaan tersebut dijelaskan bahwa:

1. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 0.259008 maka bisa diartikan bahwa jika variabel upah minimum, tingkat partisipasi angkatan kerja dan pembentukan modal tetap bruto naik satu satuan secara rerata, maka variabel ketimpangan pendapatan juga akan naik sebesar 0.259008
2. Hasil uji variabel upah minimum kabupaten/kota (UMK)
Nilai koefisien regresi variabel UMK bernilai positif sebesar 0.00000000471, maka bisa diartikan apabila nilai upah minimum kabupaten/kota (UMK) meningkat maka nilai variabel ketimpangan pendapatan juga meningkat sebesar 0.00000000471 dan begitu juga sebaliknya.
3. Hasil uji variabel tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)
Nilai koefisien regresi variabel TPAK bernilai positif sebesar 0.000757, maka bisa diartikan apabila nilai tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) meningkat maka nilai variabel ketimpangan pendapatan juga meningkat sebesar 0.000757 dan begitu juga sebaliknya.
4. Hasil Uji variabel pembentukan modal tetap bruto (PMTB)
Nilai koefisien regresi variabel PMTB bernilai positif sebesar 0.00000000665, maka bisa diartikan apabila nilai pembentukan modal tetap bruto (PMTB) meningkat maka nilai variabel ketimpangan pendapatan juga meningkat sebesar 0.00000000665 dan begitu juga sebaliknya.

Pembahasan

1. Pengaruh Upah Minimum terhadap Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur

Pada penelitian ini diungkapkan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Timur. Temuan ini sejalan dengan teori upah David Ricardo yang

berpendapat bahwa upah cukup fleksibel di pasar tenaga kerja, sehingga permintaan tenaga kerja selalu seimbang dengan penawaran tenaga kerja dan tidak ada peluang munculnya pengangguran, yang berarti pada tingkat upah riil, semua individu yang ingin bekerja pada tingkat tersebut akan mendapatkan pekerjaan. Teori dalam penelitian ini didukung oleh beberapa studi sebelumnya seperti (Panggarti et al., 2022) dan (Syilviarani, 2017) yang menunjukkan adanya hubungan positif antara upah minimum regional dan ketimpangan distribusi pendapatan, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi upah minimum, maka rasio gini cenderung meningkat. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat diukur melalui indikator pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang cepat merupakan tujuan utama dalam pembangunan, tetapi hal ini tidak selalu menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa umumnya, negara-negara berkembang seperti Indonesia menghadapi masalah kesenjangan ekonomi, yaitu perbedaan distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan yang berpenghasilan rendah.

2. Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur

Pada penelitian ini, dijelaskan bahwa partisipasi angkatan kerja memiliki dampak positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Timur. Temuan ini konsisten dengan teori *Human Capital* yang menyatakan bahwa pengaruh angkatan kerja terhadap pendapatan lebih besar bagi tenaga kerja yang lebih terampil (tenaga kerja dengan pendidikan tinggi). Usaha untuk meningkatkan jaminan kualitas angkatan kerja serta berbagai kendala dalam pendidikan meliputi masalah populasi, keterbatasan sumber daya, perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat cepat, serta sistem komunikasi yang kurang efektif (Nadya dan Aimon, 2020). Teori ini didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya, seperti (Ivanovi Sulistyaningrum et al., 2022), (Farhan & Sugianto, 2022), dan (Arif & Wicaksani, 2017), yang menemukan bahwa angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Dalam kerangka ekonomi nasional, kualitas hidup suatu negara akan meningkat seiring tingginya level pendidikan penduduknya, yang secara positif berdampak pada pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi. Semakin tinggi pendidikan tenaga kerja, semakin besar produktivitasnya, yang selanjutnya berkontribusi lebih terhadap pertumbuhan ekonomi negara.

3. Pengaruh Investasi melalui Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur

Pada penelitian ini dijelaskan bahwa pembentukan modal tetap bruto memiliki dampak positif dan signifikan terhadap tingkat ketidakmerataan pendapatan di Jawa Timur. Temuan ini mendukung teori investasi Harrod Domar yang menekankan pentingnya investasi dalam pertumbuhan ekonomi, karena menghasilkan pendapatan yang memperbesar kapasitas produksi dengan cara meningkatkan investasi. Efek dari investasi terhadap ketimpangan di negara ini akan lebih efisien dalam mengurangi jurang pemisah sosial. Teori dalam penelitian ini konsisten dengan beberapa penelitian sebelumnya, seperti (Fatmawati & Aisyah 2023), (Prawesti, 2023), dan (Wijayanti & Putri, 2023), yang menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Pulau Jawa memberikan kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan yang tertinggi kedua setelah PDB nasional. PDRB adalah total nilai tambah bruto dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah domestik akibat kegiatan ekonomi. PDRB yang diukur dengan harga yang berlaku, atau dikenal sebagai PDRB nominal, disusun dengan harga yang digunakan pada periode penghitungan, tujuannya adalah untuk menganalisis struktur ekonomi.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut adalah kesimpulan yang diperoleh:

1. Upah Minimum berdampak positif dan signifikan pada ketimpangan pendapatan di 38 kabupaten/kota Jawa Timur. Meningkatnya upah minimum berpengaruh terhadap meningkatnya ketimpangan pendapatan
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di 38 kabupaten/kota Jawa Timur. Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh terhadap meningkatnya ketimpangan pendapatan.
3. Investasi melalui Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memiliki pengaruh positif dan signifikan terkait ketimpangan pendapatan. di 38 kabupaten/kota Jawa Timur. Meningkatnya Investasi melalui Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berpengaruh terhadap meningkatnya ketimpangan pendapatan.

Daftar Pustaka

- Alawiyah, T., & Hasanah, K. (2024). *Dampak Kualitas Pendidikan dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan Ekonomi : Sebuah Analisis*. 5(8), 458–467.
- Arif, M., & Wicaksani, R. A. (2017). Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor- faktor yang Mempengaruhinya. *University Research Colloquium*, 323–328.
- Chusainy, M. N., Priyono, T. H., Zainuri, Kadzim, M. Al, Sjafruddin, & Prianto, F. W. (2023). Pengaruh Belanja Modal, Inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Disparitas Pendapatan di Kawasan Bakorwil V Jawa Timur. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Pembangunan*, 1(2), 65–71.
- Dewi, D. M., Setiadi, Y., Ikhwanuddin, M., & Fadhilah, L. A. (2022). Kontribusi Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Kelompok Ketimpangan Pendapatan Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 22(2), 221–242.
- Dongoran, F. R., Sulfina, S. D., Syah, S. A., & Siahaan, T. (2023). Analisis Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Dan Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, 1(2), 198–207.
- Fanshuri, R., & Saputra, P. M. A. (2022). Pengaruh Upah Minimum Kemiskinan Ipm Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 1(1), 148–160.
- Farhan, M., & Sugianto, S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Jawa. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(4), 243–258.
- Fatmawati, Y., & Aisyah, S. (2023). ... Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pengembangan Teknologi Informasi Dan Penanaman Modal Asing Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2019-2021. *SEIKO: Journal of Management & ...*, 6(2), 344–353.
- Ivanovi Sulistyaningrum, B., Bhinadi, S.E, M.Si, D. A., & Dwi Astuti, S.E, M.Si, R. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi-Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2020. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(4), 891–902.
- Musyriefah, M., Santoso, E., Zainuri, Z., Ratih, I. S., Fatah, A., & Almas, B. (2024). Pengaruh Pdrb, Investasi, Dan Aglomerasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Pembangunan*, 2(1), 49–57.

- Nadya, A., & Syafri, S. (2019). Analisis Pengaruh Faktor Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia. *Media Ekonomi*, 27(1), 37–52.
- Panggarti, U., Zumaeroh, Z., Dwi Purnomo, S., Retnowati, D., & Adhitya, B. (2022). Studi komparatif ketimpangan antar pulau di Indonesia. *Forum Ekonomi*, 24(2), 288–298.
- Prawesti, R. P. (2023). Analisis Investasi Dan Peran Teknologi Informasi Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 7(03), 381–392.
- Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2021). *Jurusan manajemen fakultas ekonomi dan bisnis universitas sultan ageng tirtayasa 2021*. 18.
- Sutiono, F., & Syafitri, W. (2018). Belanja Kementerian/Lembaga, Belanja APBD, Kontribusi Sektoral, dan Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(3), 186–201.
- Wijayanti, D., & Putri, I. D. N. (2023). Analisis determinan ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa tahun 2017-2022. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 2(2), 126–134.